

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

IMPLEMENTASI PERJANJIAN ASEAN-KOREA SELATAN FREE TRADE AREA (AKFTA) (STUDI KASUS INDONESIA-KOREA SELATAN TAHUN 2007-2011)

Tri Joko Waluyo

Dosen Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Abstract

This research is about trade relations between Indonesia and South Korea within the framework of AKFTA. Like other economic cooperation that attempts to realize free trade, cooperation, AKFTA cooperation aims to facilitate the flow of goods and capital. This cooperation runs international trade principles promoted by the global trade regime of the World Trade Organization (WTO).

The purpose of the research is to see how the implementation of the trade agreement AKFTA of Indonesia. This study used a qualitative research method. In this research, the author uses liberalist perspective of international cooperate theory with level analysis in nation-state. And data collection technique through the study of literature (Library Research).

The result showed that the cooperation of the Free Trade Area (FTA) within the scope of ASEAN-South Korea Free Trade Area (AKFTA) involving Indonesia had a positive implementation on the Indonesian economy. In this case can be seen from the increase in the value of Indonesia's exports to South Korea from year to years (2007-2011), then there is an increase investment of the investors from South Korea who invest capital in Indonesia.

Keywords: AKFTA, Free Trade Area

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perdagangan bebas atau *Free Trade Area* (FTA) merupakan salah satu bentuk integrasi ekonomi di dunia yang akan memberikan perlakuan khusus kepada negara mitra dagangnya dan mendiskriminasikan negara mitra dagang yang tidak masuk dalam *Free Trade Area* (FTA). *Free Trade Area* (FTA) dapat berupa penetapan tarif dan non tarif yang lebih rendah bahkan tidak ada sama sekali. Dengan menurunkan atau menghilangkan hambatan perdagangan di antara anggota, *Free Trade Area* (FTA) dapat meningkatkan alokasi sumber daya di dalam kawasan dan meningkatkan pendapatan untuk negara-negara anggota. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Salvatore (1997) bahwa perdagangan bebas akan



memaksimalkan *output* dunia dan keuntungan bagi setiap negara yang terlibat di dalamnya.

Salah satu kawasan perdagangan bebas adalah di kawasan *The Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Seiring dengan perubahan pertumbuhan ekonomi di dalam perdagangan internasional, ASEAN membuat komitmen untuk melakukan integrasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan dengan membentuk ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tahun 1992. Tujuan dari AFTA adalah untuk meningkatkan daya saing ASEAN sebagai basis produksi untuk pasar dunia melalui liberalisasi perdagangan dan kerja sama ekonomi yang lebih dekat, melalui skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) sebagai prinsip dasar dari AFTA.

Saat ini sebagian besar negara-negara di dunia berpendapat bahwa perdagangan bebas (*free trade*) merupakan kebijakan yang harus mereka tempuh sebagai jalan menuju kesejahteraan. Salah satu kerjasama yang dijalin oleh ASEAN dalam rangka mewujudkan perdagangan bebas tersebut adalah dengan Korea Selatan. Kerjasama tersebut kemudian dikenal dengan nama ASEAN-Korea Selatan Free Trade Area (AKFTA).

ASEAN-Korea Selatan Free Trade Area (AKFTA) merupakan salah satu perjanjian perdagangan internasional yang melibatkan negara-negara ASEAN termasuk Indonesia) dan Korea Selatan. *Preferential treatment* diberikan bagi negara-negara yang menjadi anggota perjanjian tersebut di tiga sektor : sektor barang, jasa, dan investasi, dengan tujuan dapat memacu percepatan aliran barang, jasa, dan investasi di antara negara-negara anggota sehingga dapat terbentuk suatu kawasan perdagangan bebas.

Dalam perjanjian perdagangan ASEAN-Korea Selatan Free Trade Area (AKFTA) ini lembaga ataupun organisasi yang terlibat yakni *World Trade Organization* (WTO) yang merupakan organisasi yang mengatur perdagangan di dunia. Tujuan ASEAN-Korea Selatan Free Trade Area (AKFTA) yaitu pertama, memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara anggota. Kedua, meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu sistem yang



transparan dan untuk mempermudah investasi, dan yang ketiga, menggali bidang-bidang kerjasama ekonomi antar negara-negara anggota.¹

Kesepakatan perdagangan barang dapat diselesaikan paling awal dengan ditandatanganinya perjanjian perdagangan barang ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) tanggal 24 Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sedangkan dua kesepakatan lain di sektor perdagangan jasa dan sektor investasi baru dapat diselesaikan masing-masing pada tahun 2007 dan 2009. Kesepakatan perdagangan jasa ditandatangani oleh para menteri ekonomi saat KTT ASEAN tahun 2007 di Singapura, sedangkan perjanjian investasi ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) ditandatangani pada saat berlangsungnya KTT ASEAN-Korea Selatan bulan Juni 2009 di Pulau Jeju, Korea Selatan.

Indonesia ikut serta dalam ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (FTA) dengan tujuan untuk menghilangkan hambatan perdagangan berupa penurunan tarif yang diwujudkan dalam perjanjian perdagangan barang. Akibat dari penurunan tarif, impor yang masuk ke pasar Indonesia semakin meningkat sejak pemberlakuan *Free Trade Area* (FTA). Singapura, Korea Selatan, dan Malaysia merupakan importir terbesar dari kawasan ASEAN-Korea.

Pemerintah Indonesia telah mengantisipasi peningkatan jumlah impor ini dengan membuat kebijakan berupa peraturan penetapan tarif bea masuk untuk ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA), ketentuan penerbitan SKA (Surat Keterangan Asal) dan UU perdagangan. Setelah perjanjian ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) ini berlangsung hampir lima tahun, perlu dilakukan evaluasi dengan melakukan analisis kuantitatif terhadap kontribusi dari perjanjian tersebut terhadap perekonomian Indonesia.

Perjanjian perdagangan barang ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) merupakan salah satu sektor penting dari perjanjian ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) yang perlu dilakukan evaluasi atau *impact assessment*. Dalam hal ini, penilaian dampak suatu *Free Trade Area* (FTA) perlu dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan suatu *Free Trade Area* (FTA) dapat dipenuhi. Dalam hal ini pendapatan nasional merupakan salah satu dari tiga indikator

¹Selayang pandang tentang ASEAN. Di akses melalui www.kemlu.go.id pada 04 -02-2017 pukul 13:14



untuk menghitung dampak dari suatu *Free Trade Area* (FTA) terhadap suatu negara dari aktivitasnya dalam perdagangan internasional .

Dalam model Keynesian empat sektor, salah satu komponen pendapatan nasional adalah kontribusi ekspor. Adanya perubahan positif kontribusi ekspor terhadap pendapatan nasional Indonesia dan Korea Selatan dalam hubungannya dengan perdagangan Indonesia-Korea Selatan mengindikasikan dampak positif dari ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) terhadap kedua negara.² Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk melihat sejauh mana dampak pada perjanjian perdagangan barang ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) terhadap Indonesia.

Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan sebuah pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti oleh penulis. Melalui perumusan masalah penulis akan melakukan upaya untuk melakukan penelitian dan berusaha untuk menemukan jawaban. Dengan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Implementasi Perjanjian ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) antara Indonesia dan Korea Selatan.

Tinjauan Pustaka

Perspektif Liberalisme, adapun asumsi dasar dari Liberalisme yakni bahwa kaum liberal umumnya mengambil pandangan positif tentang sifat manusia. Mereka memiliki keyakinan besar terhadap akal pikiran manusia dan mereka yakin bahwa prinsip-prinsip rasional dapat dipakai pada masalah-masalah internasional. Kaum liberal mengakui bahwa individu selalu mementingkan diri sendiri dan bersaing terhadap suatu hal. Tetapi mereka tidak sepakat mengenai besarnya hambatan dalam perjalanan perkembangan manusia (Smith, 1992). Bagi sebagian kaum liberal itu merupakan proses jangka panjang dengan banyak hambatan, bagi yang lain, keberhasilan hanya tinggal menunggu waktu saja. Dengan demikian, semua kaum liberal sepakat bahwa dalam jangka panjang kerjasama yang didasarkan pada

² Sigit Setiawan "Dampak Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN – Korea FTA (AKFTA) Terhadap Indonesia dan Korea Selatan" (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, 2012) Vol 16, No1

kepentingan timbal baik akan berlaku. Hal itu disebabkan modernisasi yang terus-menerus meningkatkan ruang lingkup dan kebutuhan bagi kerja sama (Zacher dan Matthew, 1995).

Pemikiran kaum liberal sangat erat hubungannya dengan kemunculan negara konstitusional modern. Kaum liberal berpendapat bahwa modernisasi adalah proses yang menimbulkan kemajuan dalam banyak bidang kehidupan. Proses modernisasi memperluas ruang lingkup bagi kerja sama lintas batas internasional. Kemajuan berarti kehidupan yang lebih baik bagi paling tidak mayoritas individu. Manusia memiliki akal pikiran, dan ketika mereka memakainya pada masalah-masalah internasional, kerjasama yang lebih besar akan menjadi hasil akhir.³

Tingkat dan unit analisis yang digunakan adalah Negara-bangsa (*Nation-state*). *Nation State level analysis* mempercayai bahwa negara adalah aktor dominan dan yang paling kuat dalam percaturan interaksi di pentas dunia. Negara relatif bebas untuk menentukan kebijakan apa yang harus diikuti. Walaupun setiap hubungan dengan realitas sistem dunia, namun pada hakikatnya negara kecil dan paling lemah sekalipun adalah aktor yang mengendalikan sistem internasional.⁴

Teori Kerjasama Internasional, merupakan seperangkat konsep konstruk, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memperinci hubungan sebab akibat yang terjadi. Teori sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah, karena kerangka dasar teori inilah yang nantinya dipergunakan oleh penulis sebagai dasar penulisan teori ini.⁵ Teori dapat diartikan sebagai suatu gagasan atau kerangka berfikir yang mengandung penjelasan, ramalan, atau anjuran pada setiap bidang penelitian.⁶

Hubungan antar negara dapat mempercepat proses perkembangan ekonomi. Hal ini sangat dirasakan sekali pentingnya bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Kerjasama negara-negara maju dapat membahas masalah-masalah bidang tertentu. Dalam memenuhi semua kebutuhannya, suatu negara perlu bekerjasama dengan negara lain atau memerlukan kerjasama ekonomi

³Robert Jackson.Georg Sorensen, 2013.*Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan edisi kelima*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar. Hal. 175-178

⁴John T. Raoukre, *International Politics on The World Stage*. USA, 2001. Hlm 81-82

⁵Burchill, Scott and Linklater, Andrew.1996. “ *Theories of International Relations*”

⁶Jack C.Plano dan Robert E.Rigs. Helena S. Robin *Kamus Analisis Politik*, Jakarta:Rajawali pers. 1985 hlm 266



internasional. Suatu negara di dunia, walaupun sudah modern wilayah luas dan sumber daya alamnya melimpah, tidak akan pernah mampu ataupun tidak akan pernah bisa hidup mandiri tanpa adanya hubungan ataupun berhubungan dengan negara lain. Pada saat ini di zaman yang sudah modern kebudayaan umat manusia di suatu negara, justru akan semakin tinggi tingkat ketergantungannya terhadap negara lain, dan melalui kerjasama internasional antar negara dalam berbagai bidang.

Menurut K.J Holsti, proses kerjasama atau kolaborasi terbentuk dari terpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional, atau global yang muncul dan memerlukan perhatian dari lebih satu negara. Masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan yang membawa usul penanggulangan masalah, mengumpulkan bukti-bukti tertulis untuk membenarkan suatu usul atau yang lainnya dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau pengertian yang memuaskan semua pihak.⁷ Kerjasama internasional bukan saja dilakukan antar negara secara individual, tetapi juga dilakukan antar negara yang bernaung dalam organisasi atau lembaga internasional. Mengenai kerjasama internasional, Koesnadi Kartasasmita mengatakan bahwa “ kerjasama internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional”.⁸

Kerjasama ekonomi internasional adalah suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh negara dengan negara lain. Kerjasama tersebut dapat terjadi hanya melibatkan dua negara saja maupun lebih. Karena adanya keterkaitan, interaksi, dan pengaruh antara faktor-faktor ekonomi dan politik dalam ruang lingkup hubungan internasional maka terdapat dua variabel pokok dalam fenomena politik internasional, yakni bahwa hakekat aktifitas ekonomi adalah pasar dan hakekat aktifitas politik adalah pasar.⁹

Kerjasama ekonomi internasional dapat berjalan dengan harmonis apabila setiap negara yang terlibat dapat menikmati keuntungannya. Selain itu, kerjasama

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

⁷K.J Holsti, *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis, Jilid II*, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga, 1998, hal. 652-653

⁸Koesnadi Kartasasmita, *Administrasi Internasional*, Lembaga Penwebitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung, 1997, hal.19

⁹Marbun, Bn.1996. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal. 101



tersebut juga harus didasari rasa ingin membantu negara lain. Mereka yang terlibat dalam kerjasama ekonomi internasional harus memahami tujuan diadakannya kerjasama tersebut. Kerjasama ini dapat dilakukan negara maju dengan negara berkembang, atau antara sesama negara maju. Kerjasama antara negara maju dengan negara berkembang diwujudkan dalam bentuk tukar-menukar barang mentah dengan barang jadi, pertukaran barang mentah dengan modal tenaga ahli. Sedangkan kerjasama antar sesama negara maju diwujudkan dalam bentuk pertukaran tenaga ahli serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu bentuk kerjasama internasional adalah kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama antar dua negara.¹⁰

2. ASEAN - Korea Selatan Free Trade Area (AKFTA)

Kawasan Asia Tenggara yang secara geopolitik dan geoekonomi mempunyai nilai strategis, menjadi incaran bahkan pertentangan kepentingan negara-negara besar pasca Perang Dunia II. Dilatarbelakangi perkembangan situasi di kawasan pada saat itu, negara-negara Asia Tenggara menyadari perlunya dibentuk suatu kerjasama yang dapat meredakan saling curiga sekaligus membangun rasa saling percaya serta mendorong pembangunan di kawasan.

Pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, lima Wakil Negara atau pemerintahan Asia Tenggara yaitu Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Malaysia dan para Menteri Luar Negeri Indonesia, Filipina, Singapura dan Thailand menandatangani Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Bangkok. Deklarasi tersebut menandai berdirinya suatu organisasi regional yang diberi nama *Association of Southeast Asian Nations/ASEAN* (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara). Organisasi ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regional yang masih pada tahap kooperatif dan belum bersifat integratif.

Pada dekade 80-an dan 90-an, ketika negara-negara di berbagai belahan dunia mulai melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi, negara-negara anggota ASEAN menyadari bahwa cara terbaik untuk

¹⁰Salvatore, Dominick. 1992. *Ekonomi Internasional*. Jakarta: Erlangga, hlm.25



bekerjasama adalah dengan saling membuka perekonomian mereka, guna menciptakan integrasi ekonomi kawasan. Pada KTT ke-5 ASEAN di Singapura tahun 1992 telah ditandatangani *Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation* sekaligus menandai dicanangkannya ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) pada tanggal 1 Januari 1993 dengan *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) sebagai mekanisme utama.

Kerjasama ekonomi ASEAN dengan negara mitra dialog berkembang sangat pesat yang terwujud dalam bentuk persetujuan kerjasama perdagangan bebas *Free Trade Area* (FTA) yaitu ASEAN-China *Free Trade Area*, ASEAN-Korea *Free Trade Area*, ASEAN-Japan CEPA, ASEAN-Australia-New Zealand *Free Trade Area*, dan ASEAN-India *Free Trade Area*. Hal ini sejalan dengan pilar ke-4 masyarakat ekonomi ASEAN yang fokus untuk melakukan integrasi dengan ekonomi global.

Hubungan kerjasama ASEAN dengan Korea Selatan secara resmi diawali pada pertemuan para pemimpin di KTT ASEAN-Korea Selatan pada bulan Oktober tahun 2003 di Bali. Pada saat itu kedua belah pihak menyetujui untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas atau *Free Trade Area*, yang kemudian kerjasama ini dikenal dengan nama ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA).

ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) merupakan perjanjian ataupun kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan Korea untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan Korea.

Negosiasi pada ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) dimulai pada awal tahun 2005 dan selanjutnya kerangka kerjasama ekonomi komprehensif antara ASEAN-Korea ditandatangani oleh ASEAN dan Korea pada tanggal 13 Desember 2005. Tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk membentuk ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) untuk memperkuat dan meningkatkan ekonomi, perdagangan dan kerjasama investasi antara negara anggota ASEAN dan Korea Selatan dengan cara liberalisasi dan mempromosikan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan transparan, liberal dan rezim investasi. Perjanjian ini juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang menguraikan, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



bertujuan untuk mengembangkan langkah-langkah yang tepat untuk kerjasama ekonomi dan integrasi, memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari negara-negara anggota ASEAN yang baru membantu dalam kesenjangan pembangunan dan membangun kerangka koperasi untuk lebih memperkuat hubungan ekonomi antara negara-negara.

Untuk mencapai tujuan dari persetujuan kerangka kerja, perdagangan ASEAN-Korea Selatan dalam perjanjian barang ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2006 oleh negara-negara anggota ASEAN, dan Korea. Thailand menyetujui ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) Pada Oktober 2009. Setelah *Trade in Goods Agreement*, perdagangan jasa ASEAN-Korea Selatan ditandatangani pada 11 November 2007 dan perjanjian investasi ASEAN-Korea Selatan ditandatangani pada 2 Juni 2009. Perjanjian tentang mekanisme penyelesaian sengketa antara ASEAN dan Korea Selatan juga di tandatangani pada 13 Desember 2005, yang menyediakan mekanisme untuk setiap sengketa yang mungkin timbul antar kedua pihak dalam perdagangan bebas ASEAN-Korea Selatan.¹¹

Adapun isi perjanjian perdagangan ekonomi komprehensif ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) yakni, berdasarkan pasal 1.3 tentang langkah-langkah untuk kemitraan ekonomi komprehensif yakni bahwasanya ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui:

penghapusan secara progresif tarif dan hambatan non-tarif di hampir seluruh perdagangan barang, hal ini dapat dilihat dengan dihapuskannya 90,5% tarif bea masuk Korea. Produk-produk yang dihapuskan tarifnya antara lain binatang hidup, ikan, sayuran, minyak sawit, produk kimia, produk kertas, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, kulit, produk kayu, dan sebagainya.

liberalisasi progresif perdagangan jasa dengan cakupan sektor yang signifikan, hal ini dapat dilihat bahwa ASEAN dan Korea Selatan sepakat untuk meningkatkan komitmen perdagangan jasa melalui penambahan sektor-sektor/subsektor baru di dalam daftar komitmen dan mempermudah aturan bagi sektor jasa termasuk sektor bisnis, konstruksi, pendidikan, komunikasi, lingkungan hidup, pariwisata dan transportasi.

Background of AKFTA. Di akses melalui <http://akfta.asean.org> pada 11-02-2017 pukul 09:36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

c. Pendirian rezim investasi yang terbuka dan kompetitif yang memfasilitasi dan mendorong investasi antara para pihak, hal ini bertujuan untuk menyediakan satu lingkungan transparan, fasilitatif dan lebih aman bagi investasi para investor ASEAN dan Korea Selatan.

d. Pemberian perlakuan khusus dan berbeda untuk negara-negara anggota ASEAN dan fleksibilitas tambahan untuk negara-negara anggota ASEAN yang baru sebagaimana disepakati dalam deklarasi bersama mengenai kerjasama kemitraan menyeluruh antara ASEAN dan Korea Selatan yang didalamnya terdapat elemen inti yang melekat, dimana dalam hal ini bagi negara-negara anggota ASEAN yang baru yakni Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar dikenakan tarif bea masuk Korea Selatan 0%.

e. Ketentuan fleksibilitas bagi para pihak dalam negosiasi ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) untuk mengatasi daerah-daerah sensitif mereka pada barang, jasa dan investasi dengan fleksibilitas untuk dinegosiasikan dan disepakati bersama berdasarkan prinsip timbal balik dan saling menguntungkan

f. Pembentukan langkah-langkah perdagangan dan fasilitas investasi yang efektif, dalam hal ini langkah-langkahnya berupa pembentukan proyek-proyek termasuk pembangunan kapasitas, bisnis yang cocok, dan program pelatihan bagi para pejabat di bidang usaha kecil dan menengah (UKM), kekayaan intelektual, pertanian, statistik dan pariwisata.

g. Eksplorasi cara dan sarana untuk memperluas kemitraan ekonomi mereka ke daerah baru dan perluasan kerjasama ekonomi di daerah-daerah yang disepakati antara pihak yang akan melengkapi pendalaman perdagangan dan hubungan investasi antara para pihak, dan

h. Pembentukan prosedur dan mekanisme untuk keperluan pelaksanaan yang efektif dari persetujuan ini, yang mana dalam hal ini prosedur dan mekanismenya berdasarkan pada perjanjian perdagangan baik itu perjanjian perdagangan sektor barang, jasa dan investasi yang telah disepakati oleh ASEAN dan Korea Selatan.

Indonesia dengan adanya perjanjian perdagangan ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) yaitu meliputi:

Meningkatnya akses pasar produk ekspor nasional ke Korea Selatan dengan tingkat tarif yang lebih rendah dan pasar yang luas.

Meningkatnya kerjasama antara pelaku bisnis di kedua negara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

3. Meningkatnya ekspor produk unggulan Indonesia dalam menjangkau peluang pasar Korea Selatan. Dalam hal ini adapun beberapa komoditas utama ekspor Indonesia ke Korea Selatan yaitu, bahan bakar mineral, karet dan barang dari karet, mesin atau peralatan listrik, bijih, kerak dan abu logam, bahan kimia organik, bubur kayu atau pulp, serat stafel buatan, kayu, barang dari kayu, besi dan baja, ampas atau sisa industri makanan dan lain-lainnya.

4. Terbukanya transfer teknologi antara pelaku bisnis di kedua negara, yaitu khususnya Indonesia negara yang kaya akan sumber daya alam dan Korea Selatan merupakan negara yang memiliki teknologi yang canggih dalam mengolah bahan-bahan mentah untuk menghasilkan suatu produk. Dengan adanya perjanjian ini maka akan terciptanya kerjasama antar pelaku bisnis di kedua negara dan akan terjadinya transfer teknologi di kedua negara.

Indonesia dengan adanya perjanjian perdagangan ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) memiliki tantangan meliputi:

1. Indonesia harus dapat meningkatkan efisiensi atau kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan dengan baik dan efektifitas atau pencapaian tujuan secara tepat untuk memproduksi sehingga dapat bersaing dengan produk-produk Korea Selatan.
2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing antar anggota di dalam perjanjian perdagangan ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA).

3. Memperluas akses pasar.

4. Meningkatkan kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi termasuk promosi pemasaran.

Indonesia telah menjalin hubungan bilateral dengan Korea Selatan selama lebih dari empat dasawarsa (lebih dari empat puluh tahun). Hubungan kedua negara tersebut telah mencakup bidang politik, ekonomi, kebudayaan, dan bahasa. Dengan penduduk lebih dari 48,7 juta jiwa pada tahun 2011, Korea Selatan tercatat sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat dan terkuat di dunia.

Perkembangan hubungan bilateral antara RI dan Korea Selatan memperoleh momentum dengan ditandatanganinya "*Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century*" di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2006. Deklarasi tersebut memuat 32 jenis kerja sama dalam bidang politik dan keamanan, ekonomi (perdagangan, investasi, infrastruktur, energi, kelautan,



kehutanan, pertanian dan lingkungan), ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sosial budaya (pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, bencana alam, dan hukum).

Prioritas Indonesia dalam kemitraan strategis dengan Korea Selatan difokuskan pada bidang-bidang: perdagangan, investasi, infrastruktur, pertahanan keamanan, dan tenaga kerja. Secara umum, selama tahun 2011, kerja sama bilateral kedua negara mengalami peningkatan di berbagai bidang baik politik, ekonomi dan sosial budaya.

Hubungan perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan menunjukkan peningkatan pada 5 (lima) tahun terakhir yakni 2007-2011. Pada tahun 2010 total perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan tercatat senilai USD 20,27 miliar, meningkat sebesar 15,97% dibandingkan dengan total perdagangan tahun 2009 senilai USD 12,88 miliar. Nilai perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan selama bulan Januari sampai dengan Agustus 2011 adalah sebesar USD 18,5 miliar, naik 44,77% dibandingkan periode yang sama tahun 2010. Hal ini dapat disimpulkan bahwasannya Indonesia diuntungkan dalam hubungan perdagangan dengan Korea Selatan, karena setiap tahunnya terjadi peningkatan perdagangan Indonesia ke Korea Selatan.

Meskipun demikian, kedua negara tetap bertekad untuk mencapai target volume perdagangan hingga USD 40 milyar pada tahun 2014 dan diharapkan dapat menjadi USD 100 milyar pada tahun 2020. Di bidang investasi, total investasi Korea Selatan (Korsel) di Indonesia sejak adanya UU PMA I/1968 bernilai lebih dari USD 20 milyar yang menempatkan Korsel pada peringkat pertama sebagai negara investor asing di Indonesia dari sisi jumlah perusahaan, dan peringkat ke-6 dari sisi jumlah nilai investasi secara keseluruhan.

Persetujuan perdagangan barang antara ASEAN-Korea Selatan telah ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2006 oleh para menteri ekonomi ASEAN dan Korea Selatan. Persetujuan perdagangan barang antara ASEAN-Korea Selatan mencakup beberapa ketentuan antara lain penurunan dan penghapusan tarif, ketentuan asal barang, perlakuan nasional mengenai perpajakan dan peraturan dalam negeri, transparansi, peraturan WTO, kebijakan pengamanan, pengecualian umum, pengkajian kembali, perubahan, penyelesaian sengketa dan mulai berlaku.

Korea Selatan merupakan negara yang menjadi contoh dunia yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang menguraikan, memperbanyak, atau seluruhnya atau sebagian dari karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



mengembangkan perdagangan dunia untuk mendorong negaranya keluar dari jebakan pendapatan menengah (*middle income trap*). Korea Selatan berhasil membangun negaranya menjadi orientasi ekspor dengan pembangunan modal sumber daya manusianya (*humancapital*) dan infrastruktur perdagangannya.

Indonesia sebagai negara anggota ASEAN dengan populasi dan pasar terbesar memiliki hubungan perdagangan yang erat dengan Korea Selatan, terlebih setelah berlakunya kesepakatan perdagangan ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA). Total perdagangan nonmigas Indonesia dan Korea Selatan mencapai US\$ 13,1 miliar tahun 2010, dimana ekspor Indonesia ke Korea Selatan pada tahun 2010 mencapai US\$ 7,6 miliar dan impor Indonesia dari Korea Selatan pada tahun yang sama mencapai US\$ 5,5 miliar dollar. Jumlah tersebut merupakan 6% dari total ekspor maupun total impor Indonesia.

Sedangkan dari neraca perdagangan keseluruhan baik migas maupun nonmigas, total perdagangan Indonesia dan Korea Selatan pada tahun 2010 mencapai US\$ 20,3 miliar dengan nilai ekspor sebesar US\$ 12,5 miliar dan impor sebesar US\$ 7,7 miliar. Nilai perdagangan tersebut naik 57,36% dibanding total perdagangan pada tahun 2009 sebesar US\$ 12,8 miliar.

Dari sisi total perdagangan, kedua negara selama 5 (lima) tahun terakhir (2006-2010) mencatat pertumbuhan positif rata-rata sebesar 15,97% dengan surplus perdagangan berada pada sisi Indonesia. Pada tahun 2010 Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar US\$ 4,8 miliar, atau naik 43,1% dibandingkan dengan tahun 2009 di mana Indonesia mencatat surplus sebesar US\$ 3,4 miliar.

Berdasarkan data terakhir BPS, total perdagangan kedua negara selama periode Januari-September 2011 adalah sebesar US\$ 21,2 miliar atau naik 47,47% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2010 sebesar US\$ 14,4 miliar. Indonesia mencatat surplus sebesar US\$ 2,6 miliar, yang merupakan penurunan sebesar 21% dibandingkan periode yang sama tahun 2010 yang mencatat surplus sebesar US\$ 3,2 miliar.

Ekspor Indonesia ke Korea Selatan didominasi oleh hasil tambang yaitu batubara dan bijih tembaga (berupa batu-batuan yang mengandung karbonat, oksida dan sulfida). Data BPS tahun 2009 mencatat ekspor batubara dan bijih tembaga masing-masing sebesar US\$ 1,9 miliar dan US\$ 1 miliar.

Selanjutnya ekspor komoditi pada tahun yang sama diikuti oleh logam olahan



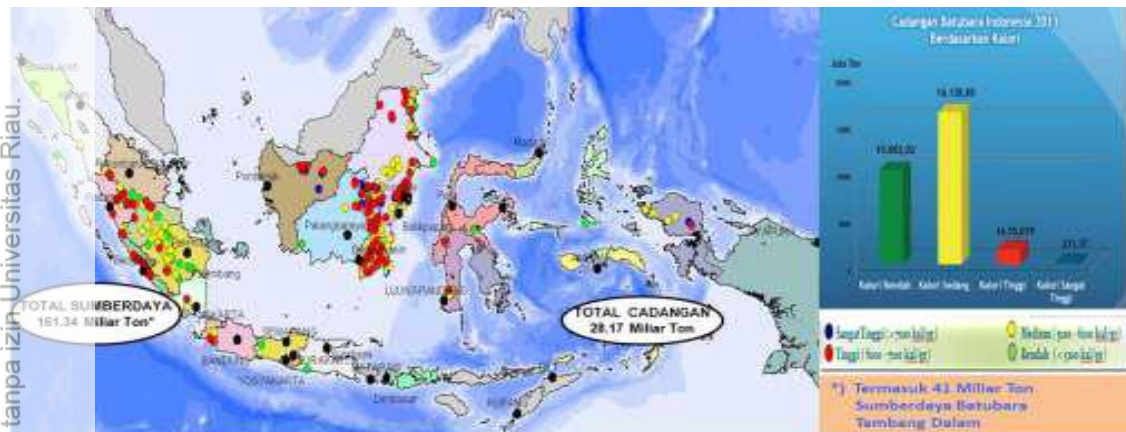
yakni berupa bijih logam yang perlu di proses menjadi bahan logam yang bermanfaat bagi manusia sebesar US\$ 332 juta, tekstil dan produk tekstil yakni berupa barang atau benda yang bahan bakunya berasal dari serat seperti kapas, poliester, rayon dan produk tekstil yakni berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari tekstil, baik yang setengah jadi maupun yang telah jadi seperti pakaian jadi atau clothing, tekstil rumah tangga dan kebutuhan industri dan dapat kita ketahui bahwasannya tekstil dan produk tekstil ini merupakan salah satu produk ekspor andalan Indonesia, dalam hal ini ekspor Indonesia ke Korea Selatan yakni sebesar US\$ 180 juta, karet alam yakni berupa elastomer yang pada awalnya berasal dari lateks yang berpenampilan seperti busu yang ditemukan dalam getah tanaman sebesar US\$ 160 juta. dan pulp kertas yakni berupa serat-serat selulosa dan hemiselulosa sebagai bahan baku kertas atau barang biasa disebut sebagai bubur kertas yakni sebesar US\$ 130 juta.

Sementara itu ekspor Korea Selatan ke Indonesia (atau impor Indonesia dari Korea Selatan) didominasi oleh produk hasil pengolahan logam sebesar US\$ 590 juta, elektronik sebesar US\$ 501 juta, kain dan serat kain sebesar US\$ 434 juta, senyawa kimia sebesar US\$ 323 juta dan peralatan dan mesin listrik sebesar US\$ 52 juta.¹²

Namun dalam hal ini, ekspor Indonesia ke Korea Selatan dalam kerangka ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) lebih di dominasi oleh hasil tambangnya yakni terutama pada batubara. Hal ini dikarenakan bahwasannya Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya yang salah satunya adalah batubara. Di bawah ini terdapat peta ataupun gambaran tentang sumber daya alam batubara yang ada di Indonesia yakni sebagai berikut:

Gambar 1. Potensi Batubara Indonesia





Sumber: Ditjen Minerba, 2012

Gambar diatas merupakan peta potensi batubara Indonesia, yang mana dalam hal tersebut batubara merupakan komoditi ekspor utama Indonesia ke Korea Selatan. Indonesia adalah salah satu produsen dan eksportir batubara terbesar di dunia. Sejak tahun 2005, ketika melampaui produksi Australia, Indonesia kemudian menjadi eksportir terdepan batubara thermal. Porsi signifikan dari batubara thermal yang diekspor terdiri dari jenis kualitas menengah (antara 5100 dan 6100 cal/gram) dan jenis kualitas rendah (di bawah 5100 cal/gram). Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh kementerian energi dan sumber daya mineral Indonesia, cadangan batubara Indonesia diperkirakan habis kira-kira dalam 83 tahun mendatang apabila tingkat produksi saat ini diteruskan.

Berkaitan dengan cadangan batubara global, Indonesia saat ini menempati peringkat ke-10 dengan sekitar 3.1 persen dari total cadangan batubara global terbukti berdasarkan Badan Pusat *Statistical Review of World Energy*. Sekitar 60 persen dari cadangan batubara total Indonesia terdiri dari batubara kualitas rendah yang lebih murah (*sub-bituminous*) yang memiliki kandungan kurang dari 6100 cal/gram.

Sejumlah kantung cadangan batubara yang lebih kecil terdapat di pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, namun demikian tiga daerah dengan cadangan batubara terbesar di Indonesia yaitu di Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Industri batubara Indonesia terbagi dengan hanya sedikit produsen besar dan banyak pelaku skala kecil yang memiliki tambang batubara dan konsensi tambang batubara (terutama di Sumatra dan

Kalimantan). Sejak awal tahun 1990-an, ketika sektor pertambangan batubara dibuka kembali untuk investasi luar negeri, Indonesia mengalami peningkatan produksi, ekspor dan penjualan batubara dalam negeri.¹³

Gambar 2. Produksi, Ekspor Batubara Indonesia-Korea Selatan dan Penjualan Domestik Batubara



Sumber: Ditjen Minerba, 2012

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa setelah di berlakukannya perjanjian perdagangan ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA), ekspor batubara Indonesia ke Korea Selatan mengalami kenaikan dari tahun 2007 sampai tahun 2011 terjadi kenaikan sebesar 110 Juta Ton, dimana kenaikan paling tinggi terjadi pada tahun 2010 ke tahun 2011, yaitu terjadi kenaikan sebesar 65 Juta Ton, dari 208 juta Ton pada tahun 2010 menjadi 273 juta Ton pada tahun 2011.

Peningkatan impor Korea Selatan yang cukup signifikan ini menunjukkan bahwa pasar Korea Selatan merupakan pasar yang tumbuh dan besar bagi ekspor Indonesia. Dampak krisis keuangan global ternyata menurunkan kapasitas impor Korea Selatan dari dunia. Kemampuan pemulihan pasar Korea Selatan ternyata tidak secepat pasar China. China berhasil merestorasi (memulihkan kepada keadaan

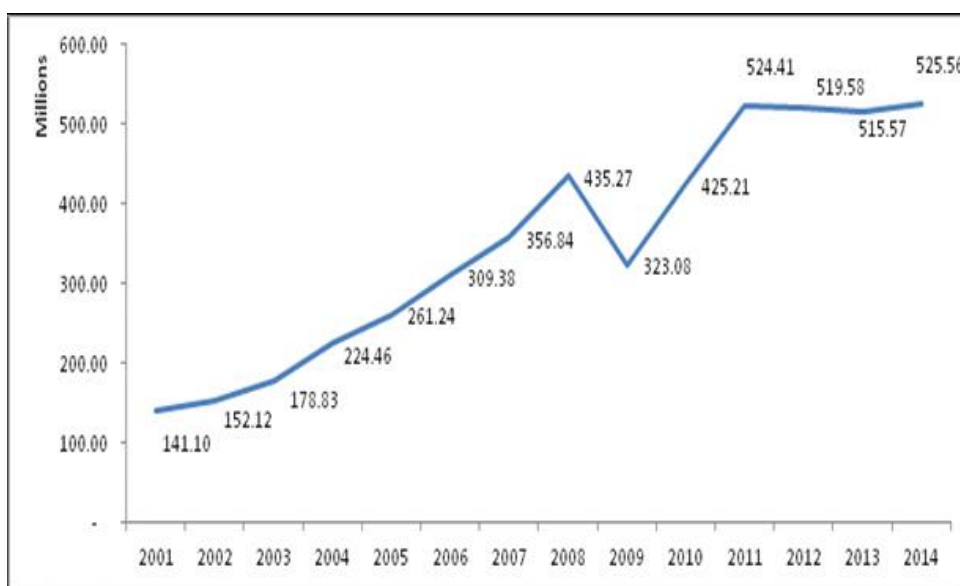
Batubara di Indonesia. Di akses melalui <http://www.indonesia-investments.com> pada 09-03-2017 pukul 12:48



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

semula) pasarnya dalam 1 tahun. Sedangkan Korea Selatan harus mengalami pemulihan selama 2 tahun. Kinerja pemulihan krisis Korea Selatan masih sangat luar biasa dibandingkan dengan Eropa dan Amerika Serikat.

Gambar 3. Perkembangan Impor Korea Selatan Dari Dunia Selama 2001 S.D 2014 (USD Milyar In C.I.F)



Sumber: TradeMap (2014, diolah oleh Puska KPI)

Pola ekspor ASEAN ke Korea Selatan dengan impor Korea Selatan dari dunia ternyata tidak begitu sama. Ekspor ASEAN ke Korea Selatan mengalami peningkatan yang cukup drastis selama 2001-2014. Indonesia telah berhasil melampaui negara-negara ASEAN lainnya di Pasar Korea Selatan. Posisi Indonesia selalu berada di atas negara-negara ASEAN lainnya.

Tabel 1. Perkembangan Ekspor Negara-Negara ASEAN di Pasar Korea Selatan Selama 2001 S.D 2014 (USD Milyar in c.i.f)

NEGERA	BEFORE AKFTA							SESUDAH AKFTA						
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
ASEAN	15.92	16.76	18.46	22.38	26.06	29.74	33.11	40.92	34.05	44.10	53.12	51.98	53.34	53.43
Indonesia	4.47	4.72	5.21	6.37	8.18	8.85	9.11	11.32	9.26	13.99	17.22	15.68	13.19	12.27
Singapore	3.01	3.43	4.09	4.46	5.32	5.89	6.86	8.36	7.87	7.85	8.97	9.68	10.37	11.31
Malaysia	4.13	4.04	4.25	5.68	6.01	7.24	8.44	9.91	7.57	9.53	10.47	9.80	11.10	11.10
Viet Nam	0.39	0.47	0.51	0.67	0.69	0.92	1.39	2.04	2.37	3.33	5.08	5.72	7.18	7.99
Thailand	1.59	1.70	1.90	2.35	2.69	3.33	3.77	4.28	3.24	4.17	5.41	5.35	5.23	5.34
Philippines	1.82	1.87	1.96	2.12	2.32	2.19	2.44	3.10	2.65	3.49	3.57	3.28	3.71	3.33
Brunei Darussalam	0.45	0.46	0.50	0.69	0.79	1.21	0.93	1.72	0.97	1.52	2.01	1.98	1.93	1.29
Myanmar	0.05	0.06	0.03	0.03	0.06	0.10	0.08	0.12	0.08	0.16	0.30	0.35	0.49	0.58
Cambodia	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.04	0.09	0.13	0.14	0.19
Lao People's Democratic Republic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.07	0.05	0.02	0.02	0.00	0.01	0.01	0.02

Sumber: TradeMap (2014, diolah Puska KPI)

Ekspor Indonesia ke Korea Selatan didominasi oleh barang primer untuk bahan baku, Hal ini karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan barang-barang primer untuk dijadikan bahan baku suatu produk dan Indonesia belum memiliki teknologi untuk mengolah barang-barang primer tersebut untuk dijadikan sebagai suatu produk, oleh karena itu Indonesia lebih mengeksport barang-barang primer atau bahan-bahan mentah.

Perbandingan dominasi barang primer dengan barang lainnya memang sangat besar. Apabila dilihat dari kandungan teknologi dan kegunaan barang tersebut dalam produksi, Indonesia belum dapat masuk dalam produksi barang yang berteknologi tinggi sehingga ekspor Indonesia ke Korea Selatan masih didorong oleh barang primer.

Tabel 2. Perkembangan Ekspor Barang Indonesia Ke Korea Selatan Berdasarkan Intensitas Teknologi Dan *Broad Economic Category* Sebelum AKFTA (2001 s.d 2007) USD Thousand



SECTOR	BEFORE AKFTA						
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Primary commodities (bahan baku penolong)	3,027,669.00	3,511,095.00	3,911,966.00	5,162,069.00	6,912,107.00	7,388,512.00	7,568,476.00
Labour-intensive and resource-based manufactures (bahan baku penolong)	268,387.00	388,750.00	335,302.00	312,097.00	294,730.00	303,268.00	462,428.00
Manufactures with high skill and technology intensity (bahan baku penolong)	170,308.00	259,342.00	286,614.00	289,224.00	277,266.00	389,121.00	333,393.00
Manufactures with low skill and technology intensity (bahan baku penolong)	22,778.00	21,072.00	35,063.00	59,463.00	54,599.00	104,709.00	171,925.00
Manufactures with high skill and technology intensity (barang modal)	32,839.00	42,284.00	115,664.00	67,338.00	104,256.00	70,979.00	119,970.00
Labour-intensive and resource-based manufactures (barang konsumsi)	38,787.00	54,406.00	63,894.00	60,518.00	75,683.00	103,639.00	118,565.00
Manufactures with medium skill and technology intensity (barang modal)	21,118.00	57,263.00	66,742.00	57,272.00	73,883.00	104,062.00	100,152.00
Manufactures with medium skill and technology intensity (bahan baku penolong)	20,903.00	38,728.00	36,924.00	39,108.00	42,150.00	42,439.00	66,080.00
Primary commodities (barang konsumsi)	34,046.00	33,478.00	36,220.00	38,689.00	38,920.00	41,410.00	64,492.00
Unclassified (barang konsumsi)	8,669.00	10,393.00	12,876.00	12,336.00	15,208.00	22,891.00	31,273.00
Manufactures with high skill and technology intensity (barang konsumsi)	9,713.00	11,519.00	8,476.00	10,572.00	10,172.00	12,027.00	27,942.00
Manufactures with medium skill and technology intensity (barang konsumsi)	9,549.00	10,851.00	11,239.00	8,048.00	6,765.00	20,965.00	25,585.00
Unclassified (bahan baku penolong)	4,602.00	6,430.00	6,013.00	9,924.00	11,939.00	11,950.00	12,967.00
Manufactures with low skill and technology intensity (barang modal)	2,150.00	9,775.00	3,598.00	2,119.00	3,137.00	1,791.00	8,166.00
Manufactures with low skill and technology intensity (barang konsumsi)	1,423.00	1,264.00	1,855.00	3,561.00	4,397.00	6,985.00	1,815.00
Unclassified (barang modal)	213.00	308.00	233.00	288.00	411.00	527.00	337.00
Unclassified (Unclassified)	800,417.00	266,451.00	279,799.00	235,633.00	258,990.00	223,310.00	283.00
Labour-intensive and resource-based manufactures (barang modal)	-	-	-	1.00	-	-	2.00
Manufactures with high skill and technology intensity (Unclassified)	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: TradeMap (2014, diolah oleh Puska KPI)

Kondisi dominasi barang primer tidak berubah dalam struktur ekspor Indonesia ke Korea Selatan. Namun ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) berhasil mengubah struktur sedikit untuk barang manufaktur yang padat karya dan berbasis sumberdaya alam. Indonesia sebelum ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) mengeksport barang manufaktur yang padat karya dan berbasis sumber daya alam untuk bahan baku penolong berarti perusahaan mengolah barang manufaktur yang padat karya dan berbasis sumber daya alam masih berada di Korea Selatan sebelum ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA).

Tetapi semua berubah ketika ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) diterapkan terutama pada investasi Korea Selatan di Indonesia. Korea Selatan dan dunia mulai berinvestasi di sektor untuk mengolah barang manufaktur yang padat karya dan berbasis sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan Korea Selatan. Indonesia mengeksport ikan mentah sebelum ASEAN-Korea Selatan



Free Trade Area (AKFTA) diterapkan, tetapi Indonesia mulai mengekspor ikan kaleng setelah ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) diterapkan karena Korea Selatan dan dunia mulai berinvestasi di sektor pengalengan ikan dalam kerangka memenuhi kebutuhan Korea Selatan.

Tabel 3. Perkembangan Ekspor Barang Indonesia Ke Korea Selatan Intensitas Teknologi Dan *Broad Economic Category* Sesudah AKFTA (2008 s.d 2011) USD Ribu

Sector	AFTER AKFTA			
	2008	2009	2010	2011
Primary commodities (bahan baku penolong)	9,450,644.00	7,658,384.00	11,880,206.00	14,653,115.00
Labour-intensive and resource-based manufactures (barang konsumsi)	130,586.00	149,772.00	227,945.00	392,947.00
Manufactures with high skill and technology intensity (bahan baku penolong)	490,149.00	383,409.00	479,955.00	543,048.00
Labour-intensive and resource-based manufactures (bahan baku penolong)	519,045.00	479,146.00	585,344.00	611,465.00
Manufactures with high skill and technology intensity (barang modal)	181,234.00	113,389.00	205,204.00	307,281.00
Manufactures with low skill and technology intensity (bahan baku penolong)	163,256.00	108,436.00	147,760.00	243,289.00
Manufactures with medium skill and technology intensity (bahan baku penolong)	74,955.00	96,002.00	102,258.00	100,082.00
Primary commodities (barang konsumsi)	82,388.00	81,931.00	85,084.00	92,524.00
Manufactures with medium skill and technology intensity (barang modal)	52,659.00	47,587.00	52,849.00	53,274.00
Manufactures with medium skill and technology intensity (barang konsumsi)	38,987.00	26,076.00	34,377.00	43,616.00
Unclassified (barang konsumsi)	41,355.00	35,681.00	42,587.00	52,320.00
Manufactures with high skill and technology intensity (barang konsumsi)	78,087.00	72,916.00	90,644.00	82,540.00
Manufactures with low skill and technology intensity (barang modal)	2,059.00	1,851.00	39,266.00	27,409.00
Unclassified (bahan baku penolong)	13,312.00	8,412.00	10,176.00	10,371.00
Unclassified (barang modal)	278.00	346.00	734.00	1,330.00
Manufactures with low skill and technology intensity (barang konsumsi)	1,275.00	754.00	1,406.00	1,709.00



Labour-intensive and resource-based manufactures (barang modal)	-	1.00	-	-
Unclassified (Unclassified)	-	2.00	2.00	4.00
Manufactures with high skill and technology intensity (Unclassified)	-	-	-	-

Sumber: TradeMap (2014, diolah Puska KPI)

Perdagangan intra barang primer terjadi antara Indonesia dan Korea Selatan. Dominasi sektor primer terlihat jelas dalam ekspor Korea Selatan ke Indonesia selama 2001 s.d 2007. Ekspor barang primer ini banyak berupa bijih besi dan beberapa produk sumber daya alam yang diimpor oleh produsen elektronik Indonesia dan sektor barang modal Indonesia.¹⁴

Tabel 4. Nilai Ekspor Dengan Skema AKFTA Dan Nilai Ekspor Tanpa Skema AKFTA Indonesia ke Korea Selatan

Periode		Total Nilai Ekspor (US\$000)
Pra AKFTA	Juli 2003-Juni 2004	2,006,559
	Juli 2004-Juni 2005	2,916,450
	Juli 2005-Juni 2006	3,769,111
	Juli 2006-Juni 2007	4,105,539
Pasca AKFTA Berlaku	Juli 2007-Juni 2008	4,188,068
	Juli 2008-Juni 2009	4,269,207
	Juli 2009-Juni 2010	6,254,087
	Juli 2010-Juni 2011	7,250,595

Sumber: BPS - Statistics Indonesia

Berdasarkan data-data dari Tabel diatas bahwasanya dengan berlakunya skema ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) nilai ekspor Indonesia Ke Korea Selatan meningkat dibandingkan dengan tanpa skema ASEAN-Korea Selatan

Laporan akhir kajian optimalisasi perjanjian perdagangan bebas Indonesia dengan mitra dagang. diakses melalui www.kemendag.go.id pada 13-03-2017 pukul 07:29



Free Trade Area (AKFTA). Dapat dilihat pada tabel diatas bahwasannya total nilai ekspor Indonesia ke Korea Selatan selalu mengalami kenaikan per tahunnya yakni dari tahun 2007-2011 setelah berlakunya skema ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA).

Tabel 5. Nilai Impor Dengan Skema AKFTA Dan Nilai Impor Tanpa Skema AKFTA Korea Selatan ke Indonesia

Periode		Total Nilai Impor (US\$000)
Pra AKFTA	Juli 2003-Juni 2004	1,546,912
	Juli 2004-Juni 2005	1,916,450
	Juli 2005-Juni 2006	2,769,111
	Juli 2006-Juni 2007	3,739,157
Pasca AKFTA Berlaku	Juli 2007-Juni 2008	3,401,549
	Juli 2008-Juni 2009	3,893,112
	Juli 2009-Juni 2010	4,137,050
	Juli 2010-Juni 2011	4,637,009

Sumber: BPS - Statistics Indonesia

Berdasarkan kedua tabel diatas dapat di simpulkan bahwa neraca perdagangan Indonesia ke Korea Selatan mengalami Surplus dimana bahwasannya nilai ekspor Indonesia ke Korea Selatan lebih besar dari pada impor Korea Selatan ke Indonesia, dan juga nilai ekspor Indonesia ke Korea Selatan selalu mengalami kenaikan setelah diberlakukannya skema perjanjian perdagangan ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA). Dan juga dapat diartikan bedasarkan kedua tabel diatas yakni bahwasannya perdagangan antara Indonesia dengan Korea Selatan positif bagi Indonesia yang artinya bahwa Indonesia diuntungkan dari perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan setelah berlakunya skema ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA).

ASEAN dan Korea Selatan menyepakati penggunaan *general rule* (peraturan secara umum) untuk mengatur *rules of origin* (ketentuan asal) suatu barang yaitu



dengan menggunakan *regional value content* (nilai total daerah yang artinya mengacu pada total nilai bahan baku, komponen, biaya tenaga kerja dan biaya pengembangan produk eksklusif yang terjadi satu sisi menjadi lebih besar atau sama dengan persentase yang disepakati dari nilai FOB barang ekspor, dan bahwa manufaktur atau pengolahan akhir operasi harus diselesaikan di daerah tersebut) tidak kurang dari 40% *Free On Board* (FOB yang artinya menunjukkan harga barang termasuk pengiriman dengan biaya penjual ke titik tertentu) yang dikenal dengan RVC-40 atau *Change of Tarif Heading* (CTH yang artinya perubahan pos tarif yang mengacu pada pengolahan dan bahan manufaktur) dan *Product Special Rules* (PSR) untuk produk-produk yang tidak menggunakan *general rule*.

Dalam rangka mengatur implementasi ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA), pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa regulasi terkait dari tingkat presiden hingga tingkat menteri. Ratifikasi kerangka perjanjian kerja sama ekonomi ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) telah dilakukan melalui penerbitan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive economic CoOperation Among The Government of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea*.

Pemerintah Indonesia telah mengantisipasi peningkatan jumlah impor ini dengan membuat kebijakan berupa peraturan penetapan tarif bea masuk untuk ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA), ketentuan penerbitan SKA (Surat Keterangan Asal) dan UU perdagangan. Setelah perjanjian ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) ini berlangsung hampir lima tahun, perlu dilakukan evaluasi dengan melakukan analisis kuantitatif terhadap kontribusi dari perjanjian tersebut terhadap perekonomian Indonesia.

Perjanjian perdagangan barang ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) merupakan salah satu sektor penting dari perjanjian ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) yang perlu dilakukan evaluasi atau *impact assessment*. Dalam hal ini, penilaian dampak suatu *Free Trade Area* (FTA) perlu dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan suatu *Free Trade Area* (FTA) dapat dipenuhi. Dalam hal ini pendapatan nasional merupakan salah satu dari tiga indikator untuk menghitung dampak dari suatu *Free Trade Area* (FTA) terhadap suatu negara dari aktivitasnya dalam perdagangan internasional.



Dalam model Keynesian empat sektor, salah satu komponen pendapatan nasional adalah kontribusi ekspor. Adanya perubahan positif kontribusi ekspor terhadap pendapatan nasional Indonesia dan Korea Selatan dalam hubungannya dengan perdagangan Indonesia-Korea Selatan mengindikasikan dampak positif dari ASEAN-Korea Selatan *Free Trade Area* (AKFTA) terhadap kedua negara.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

OH, Jeon – Soo (2014). Does ASEAN-Korea FTA Reduce Poverty In Laos, The Roles Of FDI and Trade Facilitation. (*Journal of Social and Development Sciences*) Vol 5, No 2

ohan, Khairana (2014). Diplomasi Kebudayaan Pemerintah Korea Selatan Dalam Penyebaran Hallyu Di Indonesia Tahun 2010-2012. (*eJurnal Ilmu Hubungan Internasional*) Vol 2, No 3

utri, Ray Fani Arning (2016). Pengaruh Infansi dan Nilai Tukar Terhadap Ekspor Indonesia Komoditi Tekstil dan Elektronika ke Korea Selatan. (*Jurnal Administrasi Bisnis*) Vol 35, No 1

ahim, Taufuq Abdul (2015). Perubahan Perdagangan Bebas ke Integrasi ASEAN. (*Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*) Vol 11, No 2

etiawan, Sigit (2012). Dampak Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN – Korea FTA (AKFTA) Terhadap Indonesia dan Korea Selatan. (*Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan*) Vol 16, No1

Buku

en, Marbun. 1996. Kamus Politik. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.

Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.

urchill, Scott and Linklater, Andrew.1996. *Theories of International Relations*.

holsti. K.J. 1998. *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis, Jilid II*, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga.

ackson, Robert dan Sorensen, Georg. 2013. *Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan edisi kelima*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

artasasmita, Koesnadi. 1997. *Administrasi Internasional*. Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung.



Mas'ood, Mohtar dan Yoon, Yang Seung. 2004. *Politik Luar Negri Korea Selatan*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Mas'ood, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. LP3ES. Jakarta.

Moelino, Anton M.1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia

Plano, Jack C dkk. 1985. *Kamus Analisis Politik*. Jakarta:Rajawali pers.

Raoukre, John T. 2001. *International Politics on The World Stage*. USA.

Sumapea, Tumpal. 2010. *Kamus Lengkap Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

Amir M. 2004. *Strategi Memasuki Pasar Ekspor*. Jakarta: PPM.

Kaelan,M. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma.

Salvatore, Dominick. 1992. *Ekonomi Internasional*. Jakarta: Erlangga.

Surbakti, Ramlan.1987. *Metodologi Ilmu Politik*. Surabaya.

Yang Seung-Yoon, 2005. *40 Tahun (1966-2005) Hubungan Indonesia-Korea Selatan*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Internet

Karti Kata Dampak diakses melalui www.kbbi.web.id pada Tanggal 01 Desember 2016

ASEAN-Korea FTA. Diakses melalui www.adb.org/sites/.../wp21-asean-korea-cta.pdf... Pada tanggal 29 November 2016

ASEAN-Korea FTA. Diakses melalui www.aseanbriefing.com Pada tanggal 29 November 2016

batubara di Indonesia. Di akses melalui <http://www.indonesia-investments.com> Pada tanggal 09 Maret 2017

Buku Perkembangan Kerjasama ASEAN Di Sektor Industri. Diakses melalui www.kemenperin.go.id/.../Buku-Perkembangan-Kerjasama-ASEAN-di-S... Pada tanggal 29 November 2016

Buku diplomasi Indonesia 2011 Pdf. Di akses melalui www.kemlu.go.id Pada tanggal 11 Maret 2017



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Background of AKFTA. Di akses melalui <http://akfta.asean.org> Pada tanggal 11 Februari 2017

Edited AKFTA. Diakses melalui www.asean.org Pada tanggal 29 November 2016

Free Trade Agreement. Diakses melalui www.kemenkeu.go.id Pada tanggal 29 November 2016

Kajian Pkbr Dampak AKFTA. Diakses melalui www.kemenkeu.go.id Pada tanggal 29 November 2016

Laporan akhir kajian optimalisasi perjanjian perdagangan bebas Indonesia dengan mitra dagang. Diakses melalui www.kemendag.go.id Pada 13 Maret 2017

Perngertian non-tarif. Di akses melalui <http://www.ilmuekonomi.net> pada tanggal 07 Februari 2017

Perkembangan kerjasama ASEAN di sektor industri (s.d. 2011) . Di akses melalui www.kemenprin.go.id pada tanggal 08 Maret 2017

<https://repository.beacukai.go.id/.../803a8f6987e500f44c3b35494a356be7-pmk-1...> Pada tanggal 28 November 2016

Selayang pandang tentang ASEAN. Di akses melalui www.kemlu.go.id Pada tanggal 14 Februari 2017

www.oecd.org/investment/.../46485511.pdf Pada tanggal 29 November 2016

<https://www.bps.go.id/> Pada tanggal 01 Maret 2017

